

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin melihat bagaimana pembingkaiian Kompas.com dan Tempo.co sebelum pandemi periode Februari – April 2019 dan di masa pandemi periode September – Desember 2021. Dalam pemberitaan mengenai isu kekayaan pejabat sebelum dan di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa sekalipun kedua media menjalankan fungsinya sebagai pengawas (*watchdog*) melalui pemberitaan isu kekayaan pejabat negara dengan terdapat pola yang berbeda dalam pengemasan pemberitaannya ketika dianalisis melalui perangkat *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pembingkaiian yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co karena ideologi yang dimiliki berbeda satu sama lain dari kedua media tersebut dalam pemberitaan terkait isu harta kekayaan pejabat negara. Pada pemberitaan isu kekayaan pejabat sebelum pandemi Kompas.com menekankan pada tingkat kedisiplinan pejabat negara yang secara objektif ditampilkan dalam bentuk data presentase yang masih cenderung rendah dalam melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan menggunakan *lead* deskriptif. Pada pemberitaan pun pada Kompas.com cenderung netral dan menampilkan narasumber utama yaitu dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penelitian ini juga berusaha menggali metode analisis *framing* dari konsep *episodic* dan *thematic framing* yang ada dalam keseluruhan artikel Kompas.com dan Tempo.co yang termasuk ke dalam *thematic framing* karena pemberitaan mengenai isu harta kekayaan pejabat diberitakan secara berkelanjutan dengan konteks yang lebih luas serta memberikan pemahaman secara mendalam kepada khalayak mengenai sebuah isi dalam pemberitaan. Selanjutnya mengenai struktur skrip dari hasil analisis yang telah dilakukan, Kompas.com lebih menjelaskan unsur *what* yaitu terkait dengan presentase kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat negara yang cenderung rendah

dalam melaporkan harta kekayaannya. Kemudian dalam keseluruhan artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com pada pemilihan gambar periode sebelum pandemi berkaitan dengan informasi yang disajikan, sehingga hal tersebut dapat menguatkan keterangan dari informasi pemberitaan.

Sementara pada Tempo.co dalam pembedaan lebih menekankan kritik dalam bentuk kalimat sindiran bagi pejabat negara yang masih rendah dalam melaporkan harta kekayaannya dari hal tersebut dilihat dari pemilihan narasumber yang berasal dari sindiran politikus demokrat dan tanggapan dari Menteri Perindustrian terhadap pelaporan harta kekayaan pejabat yang rendah yang diterbitkan dalam penulisan judul pemberitaan Tempo.co serta menggunakan jenis *lead* ringkasan dalam pemberitaannya. Selain itu, Tempo.co lebih menonjolkan unsur *why* mengenai rendahnya pelaporan LHKPN periode 2019 penyelenggara negara. Kemudian dalam pemilihan gambar yang ditampilkan Tempo.co berkaitan dengan informasi yang disajikan, sehingga dapat menguatkan keterangan informasi yang disajikan oleh penulis.

Pada pemberitaan mengenai isu kekayaan pejabat di masa pandemi Covid-19 Kompas.com yang dilihat dari ideologi media yang cenderung netral terhadap kebijakan dari pemerintah dengan menekankan terdapat pertambahan harta kekayaan pejabat dengan menampilkan data secara objektif dan masih dengan nada berita yang netral dan juga menggunakan *lead* deskriptif serta tingkat kepatuhan melapor harta kekayaan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat negara masih cenderung rendah seperti periode sebelum pandemi. Dalam pemilihan narasumber utama dari Kompas.com masih sama seperti periode sebelum pandemi yaitu dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam unsur yang ditonjolkan Kompas.com yaitu pada unsur *what* mengenai ungkapan kenaikan harta kekayaan pejabat negara selama pandemi Covid-19. Kemudian pada pemilihan gambar yang ditampilkan oleh Kompas.com berkaitan dengan informasi yang disajikan.

Sementara pada Tempo.co menempatkan diri sebagai media yang oposisi terhadap pemerintah yang jauh lebih kritis dengan menampilkan kalimat mengkritisi yang ditampilkan pada judul pemberitaan serta pemilihan narasumber dari pakar yang menyebutkan bahwa pejabat negara bahagia mengalami

pertambahan harta di masa pandemi di atas derita rakyat yang sedang krisis ekonomi dengan menggunakan *lead* ringkasan. Selain itu Tempo.co menonjolkan unsur *why* mengenai kenaikan harta pejabat negara selama pandemi mencapai 70,3 persen. Kemudian dalam pemilihan gambar Tempo.co di masa pandemi tidak terlalu menguatkan keterangan dari informasi yang disampaikan karena banyak foto yang tidak sesuai dengan judul pemberitaan.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut Kompas.com secara konsisten dengan posisinya yang memberitakan peristiwa isu harta kekayaan pejabat dengan penggunaan kata yang netral di masa normal maupun masa krisis. Sementara pada Tempo.co pun juga konsisten memberitakan peristiwa tersebut dengan kritik. Namun jika dibandingkan dengan periode di masa normal dan periode masa krisis, pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo.co masa krisis lebih keras dalam memberitakan peristiwa tersebut dengan mengkritik terhadap isu harta kekayaan pejabat di masa pandemi yang dilihat melalui judul pemberitaan yang diterbitkan dan pernyataan sumber. Dalam hal tersebut kedua media telah melakukan tugasnya dengan mengawasi pejabat negara namun dengan posisinya yang berbeda. Kompas.com tetap pada nertalitasnya dan cenderung untuk berpegang pada data yang objektif di lapangan dengan mendukung kebijakan pemerintah, sementara pada Tempo.co konsisten dengan posisinya sebagai oposisi yang mengkritisi pemerintah.

Dilihat dari fungsi media sebagai *watchdog*, Kompas.com dan Tempo.co sudah menjalankan peran media yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam hal ini integritas pejabat publik. Namun demikian asas keberimbangan dan keadilan belum tampak jika dilihat dari pemilihan narasumber dari kedua media tersebut. sekalipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sumber informasi pertama serta sejumlah pengamat yang mengkritisi pejabat, namun upaya dalam menghadirkan suara dari pejabat publik yang menjadi sorotan pun idealnya dilakukan sebagai pemenuhan asas *cover both side*.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian selanjutnya dengan tema serupa dapat menggunakan metode analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana wacana dari kedua media mengenai isu harta kekayaan pejabat di masa normal dan di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

5.2.2 Saran Praktis

Dalam penelitian mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat ini ditemukan bahwa media masih abai terhadap asas *fairness*. Dengan menampilkan sumber berita sebatas KPK dan pengamat. Namun belum menghadirkan pejabat publik sebagai pihak yang disorot, baik mereka yang disiplin dalam melaporkan aset kekayaan maupun yang tidak disiplin dalam melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi *content creator* untuk mempertimbangkan sudut pandang dari pembaca agar dapat membangun kredibilitas seperti bisa memahami target khalayaknya dan melihat apa yang dibutuhkan khalayak mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat.